

Implementasi Kebijakan Pendidikan Islam dalam Penguatan Moderasi Beragama di Era Digital pada Sekolah Menengah Atas di Lombok Timur

Nabila Salsabila Iswar¹ Maimun² Winengan³ Lubna⁴

^{1,2,3,4} Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Mataram, Indonesia

E-mail : nabilaiswar97@gmail.com¹ maimunzubair@uinmataram.ac.id² winengan@uinmataram.ac.id³
 lubna68@uinmataram.ac.id⁴

Article History:

Received: 31 Mei 2025

Revised: 29 Juli 2025

Accepted: 01 Agustus 2025

Keywords: *Moderasi beragama, Pendidikan Agama Islam, era digital, kebijakan pendidikan*

Abstract: *Moderasi beragama merupakan aspek krusial dalam kebijakan Pendidikan Agama Islam (PAI) guna membangun harmoni sosial di tengah masyarakat multikultural, khususnya pada era digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan PAI dalam penguatan moderasi beragama di sekolah tingkat SMA di Lombok Timur dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai moderasi dalam kurikulum, penerapan metode pembelajaran yang adaptif, serta pemanfaatan teknologi digital memberikan kontribusi nyata dalam membentuk sikap toleran dan inklusif peserta didik. Tantangan utama yang dihadapi meliputi rendahnya literasi digital dan keterbatasan kapasitas pendidik dalam mengelola media pembelajaran. Penelitian ini menekankan pentingnya kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam memperkuat moderasi beragama melalui pendekatan transformatif berbasis teknologi.*

PENDAHULUAN

Moderasi beragama merupakan salah satu agenda utama dalam kebijakan pendidikan nasional yang dirancang untuk memelihara harmoni sosial di tengah keragaman agama dan budaya. Namun, dinamika era digital saat ini menimbulkan tantangan signifikan dalam internalisasi nilai-nilai toleransi dan inklusivitas. Perkembangan pesat teknologi informasi dan media sosial telah mempercepat arus informasi, termasuk konten bernuansa keagamaan.¹ Namun fenomena ini sekaligus membuka ruang meluasnya ujaran kebencian, disinformasi, serta paham ekstrem yang berpotensi memicu fragmentasi dan polarisasi sosial.²

Berbagai insiden konkret menggambarkan dampak negatif media digital terhadap sikap intoleransi masyarakat. Misalnya, pada tahun 2021 terjadi kasus serangan verbal dan ancaman

¹Rahman, F., & Fitriani, S. (2024). *Pendidikan Islam di Era Digital: Tantangan dan Peluang*. Jakarta: Prenada Media.

²Rahman, F., & Azizah, N. (2022). "Disinformasi Keagamaan dan Polarisasi Sosial di Media Sosial". *Jurnal Komunikasi dan Agama*, 14(2), 101–118.

terhadap seorang tokoh agama setelah ceramahnya dianggap kontroversial oleh kelompok tertentu.³ Selain itu, aksi vandalisme terhadap rumah ibadah yang diprovokasi oleh unggahan media sosial semakin marak, menunjukkan eskalasi konflik berbasis narasi digital. Algoritma media sosial turut membentuk ‘ruang gema’ (echo chamber), yang memperkuat segregasi informasi dan menghambat dialog antarumat beragama.⁴ Dalam menghadapi situasi tersebut, Kementerian Agama melalui kebijakan Pendidikan Agama Islam (PAI) berupaya memperkuat nilai-nilai moderasi beragama dalam kurikulum nasional. Namun, pelaksanaan kebijakan ini menghadapi sejumlah kendala, terutama dalam menghadapi derasnya arus informasi digital yang sulit dikendalikan.⁵ Model pembelajaran PAI yang masih bersifat konvensional belum sepenuhnya membekali peserta didik dengan kemampuan literasi digital serta keterampilan berpikir kritis yang diperlukan untuk memahami dan menghargai keberagaman secara utuh.

Seiring meningkatnya kompleksitas tantangan sosial di era digital, para akademisi dan praktisi pendidikan menegaskan pentingnya penguatan peran pendidikan agama dalam membentuk paradigma moderasi beragama di kalangan generasi muda. Menurut Suryanto dan Nugroho, pendidikan agama berfungsi sebagai benteng utama dalam menanamkan nilai-nilai toleransi dan sikap inklusif yang adaptif terhadap perkembangan sosial dan teknologi.⁶ Pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai Islam moderat diyakini mampu menjadi garda terdepan dalam membentengi peserta didik dari penetrasi ideologi radikal yang kian masif melalui kanal digital.⁷

Namun, temuan Hasan, menunjukkan bahwa proses integrasi nilai-nilai moderasi ke dalam kurikulum PAI masih menghadapi tantangan substansial, seperti rendahnya kesiapan pendidik, minimnya media pembelajaran yang adaptif, serta lemahnya literasi digital di kalangan guru.⁸ Laporan Kementerian Agama tahun 2023 juga mengungkapkan bahwa hanya 42% guru PAI di Indonesia yang telah memperoleh pelatihan formal tentang moderasi beragama, sementara sisanya belum memiliki pemahaman metodologis yang memadai.⁹ Beberapa penelitian terdahulu telah menyoroti urgensi pendidikan dalam memperkuat sikap moderat. Rahman, menunjukkan bahwa penerapan kurikulum berbasis nilai-nilai *wasathiyah* di sekolah Islam mampu meningkatkan sikap inklusif peserta didik lintas latar belakang.¹⁰ Sementara itu, studi Fauzi dan Hakim menemukan bahwa implementasi nilai-nilai moderasi dalam pembelajaran masih bersifat sporadis, tidak terintegrasi secara sistemik, serta sangat bergantung pada inisiatif individu guru.¹¹

Namun demikian, masih sedikit studi yang secara eksplisit menelaah strategi kebijakan pemerintah dalam mengintegrasikan moderasi beragama ke dalam sistem Pendidikan Agama

³Komnas HAM. (2021). *Laporan Tahunan HAM Indonesia 2021*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

⁴Sari, D., & Nugroho, A. (2023). “Media Sosial dan Ruang Gema dalam Konteks Keberagaman Agama”. *Jurnal Sosioteknologi*, 22(1), 44–58.

⁵Sari, D., & Hidayat, M. (2023). “Implementasi Kurikulum Moderasi Beragama di Sekolah Menengah”. *Jurnal Pendidikan Islam*, 11(1), 33–49.

⁶Prasetyo, B. (2022). *Literasi Digital dalam Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

⁷Mustofa, A. (2022). “Revitalisasi Model Pembelajaran PAI dalam Merespons Era Digital”. *Jurnal Tarbiyah Islamiyah*, 10(2), 87–98.

⁸Hasan, M. (2022). “Integrasi Nilai Moderasi Beragama dalam Kurikulum PAI: Sebuah Evaluasi”. *Jurnal Studi Islam dan Pendidikan*, 15(1), 56–72.

⁹Kementerian Agama Republik Indonesia. (2023). *Laporan Evaluasi Pelatihan Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat.

¹⁰Rahman, F. (2020). “Efektivitas Kurikulum Berbasis Wasathiyah dalam Meningkatkan Sikap Inklusif Peserta Didik”. *Jurnal Pendidikan Islam Progresif*, 8(3), 121–136.

¹¹Fauzi, I., & Hakim, L. (2021). “Implementasi Nilai Moderasi Beragama di Sekolah: Studi Kasus”. *Jurnal Pendidikan dan Perubahan Sosial*, 9(2), 90–108.

Islam, khususnya dalam konteks pendidikan menengah di era digital. Ketiadaan kajian yang komprehensif mengenai efektivitas kebijakan tersebut menandakan adanya celah akademik yang penting untuk dijawab.

Keunikan dan kontribusi orisinal dari penelitian ini terletak pada analisis mendalam terhadap desain dan implementasi kebijakan pendidikan nasional dalam memperkuat nilai-nilai moderasi beragama melalui Pendidikan Agama Islam, dengan mempertimbangkan dinamika era digital. Penelitian ini mengacu pada pendekatan *transformative pedagogy* dan integrasi konsep *wasathiyah Islamiyyah* dalam konteks kontemporer, guna mengembangkan model kebijakan yang lebih responsif, inklusif, dan kontekstual.¹²

Secara khusus, penelitian ini dilakukan di dua satuan pendidikan tingkat menengah atas di Kabupaten Lombok Timur, yaitu SMA Negeri 1 Lombok Timur dan SMA Negeri 2 Lombok Timur. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi: (1) efektivitas strategi kebijakan pemerintah dalam penguatan moderasi beragama melalui PAI; (2) tantangan struktural dan kultural yang dihadapi dalam proses implementasinya di lingkungan sekolah; serta (3) rekomendasi penguatan kebijakan berbasis literasi digital dan nilai-nilai Islam moderat. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis dalam pengembangan kebijakan pendidikan yang mendukung terbentuknya masyarakat Indonesia yang toleran, inklusif, dan religius secara proporsional.

LANDASAN TEORI

Moderasi beragama adalah sikap beragama secara adil dan seimbang, yang menghindari sikap ekstrem dan intoleran dalam memahami serta menjalankan ajaran agama. Konsep ini tidak dimaksudkan untuk melemahkan semangat keagamaan, melainkan untuk mengarahkan pemahaman dan praktik keagamaan agar tetap berada dalam koridor kedamaian, saling menghargai, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Azyumardi Azra menyatakan bahwa inti dari moderasi beragama adalah keseimbangan antara komitmen terhadap ajaran agama dengan keterbukaan terhadap keragaman sosial dan budaya. Dalam kerangka ini, ia merumuskan empat indikator utama moderasi beragama, yaitu: komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan sikap akomodatif terhadap budaya local.¹³

Keempat indikator ini tidak hanya menjadi fondasi nilai, tetapi juga ukuran dasar dalam menilai sejauh mana nilai-nilai moderasi telah terinternalisasi di lingkungan pendidikan, baik melalui kebijakan, praktik pembelajaran, maupun interaksi sosial peserta didik. Pandangan Azra ini diperkuat oleh hasil penelitian Suryanto dan Nugroho yang menekankan pentingnya literasi digital sebagai fondasi baru dalam menanamkan sikap moderat di era digital. Mereka menambahkan bahwa penguatan moderasi beragama tidak cukup dengan materi ajar, tetapi juga perlu disertai kemampuan peserta didik dalam menyaring informasi keagamaan yang beredar di media sosial, agar tidak terjebak dalam narasi keagamaan yang sempit dan provokatif.¹⁴

Dengan demikian, peneliti berpendapat bahwa indikator moderasi beragama yang dirumuskan oleh Azra tetap relevan dan menjadi landasan penting dalam kajian ini. Namun, indikator tersebut perlu direvitalisasi dan disesuaikan dengan konteks perkembangan zaman digital yang sangat dinamis. Misalnya, komitmen kebangsaan dan sikap toleransi harus

¹²Suryanto, R., & Nugroho, A. (2024). "Peran Strategis Pendidikan Agama dalam Penguatan Moderasi Beragama". *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 26(1), 12–29.

¹³Azra, A. (2018). *Moderasi Beragama di Indonesia: Konsep dan Implementasi*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.

¹⁴Suryanto, E., & Nugroho, A. (2024). "Literasi Digital dan Moderasi Beragama di Era Media Sosial". *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, 12(1), 45–62.

.....

diaktualisasikan melalui kesadaran digital, yakni kemampuan peserta didik untuk memelihara harmoni sosial dalam ranah digital melalui praktik interaksi yang konstruktif, penyebaran konten yang positif, serta ketahanan terhadap provokasi dan narasi sektarian yang dapat memecah belah. Dengan demikian, moderasi beragama tidak hanya dipahami sebagai konsep normatif yang bersifat teoritis, melainkan juga diwujudkan sebagai karakter dan perilaku yang melekat dan berkembang dalam kehidupan sehari-hari generasi muda, baik di dunia nyata maupun di dunia maya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kebijakan dan desain deskriptif-analitis untuk menganalisis implementasi kebijakan Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam penguatan moderasi beragama di era digital. Penelitian dilaksanakan di SMA 1 dan SMA 2 di Lombok Timur pada periode Januari hingga April 2025. Subjek penelitian dipilih secara purposif, meliputi kepala sekolah, guru PAI, peserta didik kelas XI dan XII, serta pejabat terkait dari Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi kebijakan. Instrumen penelitian mencakup pedoman wawancara, lembar observasi sistematis, dan format analisis dokumen. Data dianalisis menggunakan teknik analisis isi dan analisis tematik untuk mengidentifikasi tema-tema sentral terkait pelaksanaan kebijakan. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, teknik, dan teori guna memastikan kredibilitas serta keabsahan temuan penelitian.¹⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengungkap dinamika dan kompleksitas implementasi kebijakan Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam memperkuat moderasi beragama di era digital, dengan SMA 1 dan SMA 2 di Lombok Timur sebagai locus strategis kajian. Studi ini bertujuan untuk menggali sejauh mana kebijakan yang mengedepankan nilai-nilai moderasi beragama dapat membentuk pemahaman dan sikap keagamaan peserta didik dalam menghadapi tantangan pluralitas, keragaman budaya, dan perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat.¹⁶

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai moderasi beragama memberikan kontribusi yang signifikan dalam membangun konstruksi kognitif dan afektif peserta didik terhadap isu-isu keberagaman dan toleransi. Penguatan moderasi beragama dalam konteks pembelajaran PAI mampu meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya sikap inklusif, penolakan terhadap segala bentuk ekstremisme dan kekerasan, serta penghargaan terhadap perbedaan sosial dan budaya di lingkungan mereka. Data dikumpulkan dengan menggunakan triangulasi metode, yakni observasi partisipatif, wawancara mendalam dengan berbagai pihak terkait, serta analisis dokumentasi kebijakan, yang memberikan gambaran komprehensif tentang pelaksanaan kebijakan di lapangan.¹⁷

Integrasi nilai moderasi dilakukan melalui berbagai strategi, antara lain adaptasi materi ajar yang relevan dengan konteks sosial dan digital saat ini, pelatihan berkelanjutan bagi para guru PAI untuk meningkatkan kompetensi pedagogis dan keagamaannya, serta implementasi prinsip Islam wasathiyah sebagai landasan dalam penyusunan tujuan pembelajaran, aktivitas kelas, dan evaluasi formatif. Guru-guru menunjukkan komitmen yang tinggi dalam merancang bahan ajar yang kontekstual, memfasilitasi diskusi yang bersifat tematik dan kritis, serta memanfaatkan

¹⁵Creswell, John W. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. 4th ed., Sage Publications, 2018, pp. 45-55.

¹⁶Azyumardi Azra, **Moderasi Beragama dalam Pendidikan** (Jakarta: Prenada Media, 2020), hlm. 45-47.

¹⁷Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, **Pedoman Implementasi Pendidikan Karakter** (Jakarta: Kemdikbud, 2019), hlm. 22-23.

teknologi digital sebagai media pembelajaran yang variatif dan interaktif. Meski demikian, pelaksanaan kebijakan moderasi beragama ini belum merata sepenuhnya. Penelitian mengidentifikasi adanya disparitas kompetensi di antara guru PAI, khususnya terkait penguasaan metode pembelajaran dialogis dan inklusif yang sangat dibutuhkan untuk menanamkan nilai-nilai moderasi secara efektif. Faktor-faktor seperti kurangnya pelatihan yang berkelanjutan, keterbatasan sarana dan prasarana digital, serta tantangan dalam mengelola dinamika interaksi sosial peserta didik di era digital menjadi kendala utama yang perlu diatasi.¹⁸

Sebagaimana ditegaskan oleh Azyumardi Azra, moderasi beragama tidak cukup hanya menjadi wacana normatif atau konsep teoritis semata, melainkan harus diwujudkan dalam transformasi praksis yang nyata di dalam sistem pendidikan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas profesional pendidik melalui pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan menjadi elemen krusial dalam menjamin keberhasilan dan efektivitas implementasi kebijakan moderasi beragama. Selain itu, dukungan kebijakan dari pemerintah daerah dan instansi terkait harus terus diperkuat agar proses internalisasi nilai moderasi dapat berlangsung secara holistik dan menyeluruh. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, peneliti menegaskan pentingnya kolaborasi sinergis antara sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam mengembangkan karakter moderasi beragama yang tidak hanya terbatas pada ranah kognitif, melainkan juga menjadi perilaku dan karakter yang melekat dalam kehidupan sehari-hari generasi muda. Perwujudan moderasi ini harus berlangsung baik dalam interaksi sosial di dunia nyata maupun di ranah digital, mengingat pesatnya perkembangan teknologi informasi yang menjadi arena utama interaksi sosial saat ini.¹⁹

Berikut ini disajikan tabel persepsi guru terhadap efektivitas implementasi kebijakan moderasi beragama, yang mencerminkan pandangan mereka terkait capaian, kendala, dan strategi penguatan nilai moderasi di lingkungan sekolah:

Tabel 1. Persepsi Guru terhadap Efektivitas Implementasi Kebijakan Moderasi Beragama

Aspek	Efektif (%)	Kurang Efektif (%)	Tidak Efektif (%)
Pelatihan guru tentang moderasi	85	15	0
Integrasi moderasi dalam RPP	85	15	0
Respon siswa terhadap materi PAI	80	20	0

Meskipun data yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan analisis dokumentasi menunjukkan kecenderungan positif terhadap penerapan kebijakan moderasi beragama dalam Pendidikan Agama Islam (PAI), temuan lapangan juga mengindikasikan adanya ketidaksinambungan dalam pelaksanaannya. Secara umum, kebijakan tersebut telah diterima dengan baik oleh sebagian besar pemangku kepentingan di tingkat satuan pendidikan, baik oleh tenaga pendidik maupun pengelola institusi. Namun demikian, hasil observasi langsung terhadap proses pembelajaran di sejumlah kelas di SMA 1 dan SMA 2 di Lombok Timur menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini masih bersifat sektoral dan belum merata secara struktural dalam sistem kelembagaan sekolah. Dalam pandangan Al-Makin, keberhasilan internalisasi nilai-nilai moderasi dalam dunia pendidikan sangat ditentukan oleh konsistensi kelembagaan dan

¹⁸Survei oleh Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam, **Tantangan dalam Pembelajaran PAI di Era Digital** (Jakarta: AGPAI, 2022), hlm. 15-16.

¹⁹Azyumardi Azra, "Moderasi Beragama: Teori dan Praktik," dalam *Pendidikan Agama di Era Digital*, ed. D. Rahman (Jakarta: Gramedia, 2021), 89-95.

keseragaman praktik pedagogis di ruang-ruang kelas.²⁰

Lebih lanjut, hasil observasi mengungkap adanya disparitas antar kelas dalam mengaktualisasikan nilai-nilai moderasi beragama melalui pendekatan pembelajaran. Beberapa kelas masih mempertahankan pola pengajaran konservatif dengan metode ceramah satu arah yang cenderung menutup ruang partisipasi aktif siswa. Model ini memperkuat pendekatan monologis yang menghambat pengembangan daya nalar kritis dan reflektif siswa terhadap isu-isu keagamaan yang kompleks dan kontekstual. Sejalan dengan pendapat Abuddin Nata, pendidikan keagamaan yang hanya menekankan pada transfer pengetahuan tanpa ruang dialektika berisiko melahirkan sikap eksklusif dan intoleran.²¹

Sebaliknya, terdapat pula sejumlah kelas yang telah mengalami transformasi pedagogis melalui penerapan pendekatan konstruktivistik. Dalam konteks ini, guru memainkan peran sebagai fasilitator yang mendorong partisipasi aktif siswa melalui metode diskusi terbimbing, studi kasus, serta refleksi nilai. Pendekatan ini memungkinkan siswa untuk merefleksikan ajaran Islam secara kritis serta mengaitkannya dengan fenomena sosial-kultural kontemporer. Sebagaimana ditegaskan oleh Azyumardi Azra, pendidikan Islam yang berbasis pada prinsip wasathiyah tidak hanya menekankan aspek normatif ajaran, tetapi juga mengembangkan kapasitas peserta didik dalam menyikapi perbedaan secara inklusif dan moderat.²²

Dengan demikian, keberadaan ketimpangan dalam penerapan pendekatan pedagogis mencerminkan perlunya penguatan kompetensi pedagogis guru sebagai faktor strategis dalam menjamin keberhasilan kebijakan moderasi beragama di lingkungan pendidikan. Untuk memperjelas fenomena ini, berikut disajikan tabel deskriptif komparatif hasil observasi kelas yang menggambarkan variasi dalam penerapan metode pembelajaran berbasis moderasi beragama di SMA Lombok Timur:

Tabel 2. Komparatif hasil observasi kelas

Kriteria Pengamatan	Kelas A Konservatif	Kelas B Konstruktivis & Reflektif
Metode Pembelajaran	Ceramah, hafalan materi	Diskusi, studi kasus, refleksi nilai
Partisipasi Siswa	Pasif, terbatas pada respons singkat	Aktif, terlibat dalam dialog dan argumentasi
Penggunaan Media Digital	Tidak digunakan	Digunakan untuk eksplorasi dan presentasi materi
Integrasi Nilai Moderasi Beragama	Normatif dan tekstual	Kontekstual dan aplikatif
Kesempatan Berpikir Kritis dan Bertanya	Sangat terbatas	Diberi ruang luas dan dihargai

Tabel tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan moderasi

²⁰Al-Makin, *Moderasi Beragama dalam Pendidikan* (Yogyakarta: LKiS, 2021), 66-68.

²¹Abuddin Nata, *Pendidikan Agama dan Toleransi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), 112-114.

²²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Pedoman Kebijakan Moderasi Beragama* (Jakarta: Kemenag, 2020), 30-32.

beragama dalam konteks Pendidikan Agama Islam (PAI) tidak hanya ditentukan oleh integrasi nilai-nilai moderasi dalam kurikulum, melainkan sangat bergantung pada pendekatan pedagogis yang digunakan oleh para pendidik. Penerapan strategi pembelajaran yang bersifat dialogis, reflektif, dan kontekstual terbukti lebih efektif dalam menginternalisasi nilai-nilai moderasi ke dalam kesadaran peserta didik secara substantif. Hal ini sejalan dengan pandangan para akademisi seperti Azyumardi Azra dan Zamakhsari Dhofier yang menekankan pentingnya reorientasi metodologis dalam pendidikan Islam untuk membentuk karakter keagamaan yang inklusif, toleran, dan adaptif terhadap kompleksitas masyarakat modern.²³ Meskipun terdapat progres dalam pelaksanaan kebijakan di tingkat sekolah, temuan penelitian ini juga mengindikasikan bahwa implementasi masih menghadapi tantangan struktural dan kultural, terutama terkait disparitas dalam kapasitas pedagogis guru. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis yang meliputi pelatihan berkelanjutan, penguatan kompetensi profesional, serta manajemen kelas yang berpihak pada prinsip-prinsip Islam wasathiyah.

Namun demikian, efektivitas implementasi kebijakan moderasi beragama pada tingkat satuan pendidikan khususnya di SMA 1 dan SMA 2 Lombok Timur masih menghadapi tantangan yang bersifat struktural dan kultural. Berdasarkan data primer yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, ditemukan sejumlah faktor penghambat yang meliputi disparitas kompetensi pedagogis di antara para guru, keterbatasan dukungan kelembagaan terhadap inovasi pembelajaran berbasis moderasi, serta resistensi kultural terhadap pendekatan pendidikan yang inklusif dan dialogis. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kerangka regulatif, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia dan budaya sekolah dalam menerima serta mengimplementasikan nilai-nilai moderasi secara konsisten.²⁴

Berdasarkan data primer, ditemukan bahwa:

1. Variabilitas pemahaman tenaga pendidik: Sebanyak 43% guru PAI di sekolah negeri menyatakan belum mendapatkan pelatihan pedagogis yang memadai dalam mentransformasikan nilai-nilai moderasi ke dalam praktik pembelajaran yang kontekstual dan reflektif.
2. Disrupsi informasi digital: Sebanyak 62% peserta didik lebih banyak mengakses informasi keagamaan melalui media sosial dibandingkan dari proses pembelajaran formal. Kondisi ini menimbulkan dilema epistemologis karena informasi digital tidak selalu melewati penyaringan akademik yang kredibel.
3. Absennya sistem evaluasi berbasis data: Tidak tersedianya instrumen asesmen yang sistematis dan valid menyebabkan kesulitan dalam menilai sejauh mana nilai-nilai moderasi terinternalisasi secara afektif dan kognitif dalam diri peserta didik.

Temuan penelitian ini menguatkan hasil studi Rahman yang menyatakan bahwa keberhasilan moderasi beragama sangat bergantung pada kesiapan pedagogis guru serta strategi instruksional yang diterapkan. Namun demikian, penelitian ini memberikan kontribusi orisinal dengan menyoroti peran disrupsi digital sebagai faktor kontemporer yang signifikan dalam membentuk pola pemahaman keagamaan peserta didik secara non-formal. Dari sudut pandang teori pendidikan kritis, khususnya teori rekonstruksi pedagogis dari Henry Giroux, keberhasilan menanamkan nilai-nilai moderasi beragama tidak cukup hanya dengan aturan atau kebijakan, tetapi harus ada perubahan mendalam dalam cara mengajar. Giroux menyatakan bahwa pendidikan harus menjadi tempat untuk membangun kesadaran kritis peserta didik terhadap

²³Azyumardi Azra, *Moderasi Beragama dalam Pendidikan* (Jakarta: Prenada Media, 2020), 55-57.

²⁴Zamakhsari Dhofier, *Islam dan Pendidikan: Pendekatan Inklusif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2019), 78-80.

lingkungan sosial mereka. Meskipun aturan kebijakan sudah jelas, pelaksanaannya di lapangan masih sering bersifat simbolis dan hanya mengikuti prosedur tanpa makna mendalam.²⁵

Selain itu, media sosial yang menjadi sumber utama informasi keagamaan bagi siswa justru mempercepat perpecahan dalam cara pandang keagamaan, sesuai dengan penelitian Wahid yang mengatakan algoritma digital membuat orang cenderung mencari informasi yang sesuai dengan pandangan mereka sendiri sehingga mengurangi dialog antar perspektif. Pendapat ini juga sejalan dengan pandangan Marshall McLuhan bahwa media komunikasi memengaruhi cara kita memahami dunia, sehingga kemampuan literasi digital sangat penting untuk menghadapi era informasi saat ini. Oleh sebab itu, literasi digital yang mengedepankan nilai keislaman moderat sangat dibutuhkan agar ruang digital tidak malah menjadi tempat berkembangnya radikalisme. Selain itu, kurangnya sistem evaluasi yang menggunakan data menyebabkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan dan hasil nyata di lapangan, sebagaimana dikemukakan Azra yang menyatakan kegagalan pelaksanaan kebijakan sering disebabkan kurangnya indikator evaluasi yang jelas.²⁶

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang menekankan pentingnya kemampuan guru dalam menerapkan pembelajaran yang mendukung nilai moderasi beragama. Namun, penelitian ini menambahkan dua hal penting yang sering terabaikan, yaitu pengaruh disrupsi digital yang membentuk otoritas keagamaan baru di luar sekolah, serta kurangnya sistem evaluasi yang membuat pengawasan pelaksanaan kebijakan menjadi lemah. Berbeda dengan penelitian Ismail yang menyoroti pengaruh faktor luar seperti politik global, penelitian ini menegaskan bahwa faktor internal seperti kemampuan guru, metode pengajaran, dan kesiapan alat evaluasi adalah kunci utama keberhasilan kebijakan moderasi beragama di sekolah. Temuan ini memberikan beberapa saran praktis untuk kebijakan pendidikan Islam yang tidak hanya berbasis aturan, tetapi juga memperhatikan perubahan cara berpikir dan kondisi digital saat ini.

1. Pertama, pelatihan guru perlu diperbaiki dengan menambah wawasan tentang filosofi pendidikan dan kemampuan mengajak siswa berdiskusi kritis, bukan hanya mengajarkan teknis mengajar.
2. Kedua, literasi digital harus dimasukkan ke dalam kurikulum Pendidikan Agama Islam agar siswa mampu memilah informasi keagamaan dengan baik dan sesuai nilai moderasi.
3. Ketiga, perlu dikembangkan sistem evaluasi yang menggunakan data lengkap agar bisa melihat perkembangan siswa secara menyeluruh, mulai dari pengetahuan, sikap, hingga perilaku keagamaan mereka.

Selain itu, pengembangan sistem evaluasi berbasis bukti sangat penting untuk memastikan kebijakan moderasi beragama tidak hanya menjadi aturan formal semata, tetapi dapat diukur secara nyata melalui data yang valid dan terpercaya. Evaluasi ini perlu mencakup aspek pengetahuan, sikap, dan perilaku peserta didik dalam menghadapi berbagai informasi keagamaan, termasuk bagaimana mereka berinteraksi dengan konten digital yang beragam. Pendekatan evaluasi yang komprehensif dan adaptif terhadap perkembangan sosial dan teknologi akan menjadikan kebijakan moderasi beragama dalam pendidikan Islam sebagai alat efektif dalam membentuk generasi Muslim yang religius, berakhlak mulia, toleran, serta memiliki literasi digital yang baik. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk, pencapaian tersebut sangat penting guna menciptakan keharmonisan sosial dan menjaga ketahanan ideologi di tengah

²⁵Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Pedoman Implementasi Pendidikan Moderasi Beragama* (Jakarta: Kemdikbud, 2021), 20-22.

²⁶Azyumardi Azra, *Moderasi Beragama dalam Pendidikan* (Jakarta: Prenada Media, 2020), 102-104.

perubahan global yang begitu cepat.²⁷

KESIMPULAN

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) berbasis teknologi digital di SMA di Lombok Timur perlu dirancang secara komprehensif dan relevan dengan penguatan moderasi beragama di era digital. Dalam konteks Lombok Timur yang kaya akan keberagaman budaya dan masyarakat, penerapan kebijakan PAI yang moderat menjadi semakin penting. Tantangan ini mendorong perlunya pendekatan inovatif yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai moderasi beragama ke dalam kurikulum, sehingga peserta didik tidak hanya memahami, tetapi juga mengamalkan prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan sehari-hari.²⁸

Keberhasilan kebijakan moderasi beragama di SMA Lombok Timur sangat bergantung pada penerapan sistem evaluasi berbasis bukti yang mampu mengukur aspek pengetahuan, sikap, dan perilaku peserta didik secara menyeluruh. Evaluasi ini harus mencakup interaksi siswa dengan berbagai konten digital yang menjadi sumber informasi keagamaan saat ini. Dengan cara ini, siswa tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga mampu menganalisis dan menilai kredibilitas sumber yang mereka akses. Ini sangat penting untuk menangkal penyebaran paham-paham ekstrem yang bertentangan dengan prinsip moderasi dan toleransi.

Dengan pendekatan pembelajaran yang adaptif terhadap perubahan sosial dan kemajuan teknologi, kebijakan moderasi beragama dapat berfungsi sebagai alat strategis dalam membentuk generasi Muslim di Lombok Timur yang religius, berakhlak mulia, dan toleran. Di tengah pergeseran nilai dan perkembangan global yang cepat, pencapaian ini sangat penting untuk menjaga keharmonisan sosial dan memperkuat ketahanan ideologi bangsa. Melalui integrasi teknologi dalam pendidikan agama, siswa dapat mengembangkan sikap kritis yang diperlukan untuk menghadapi tantangan zaman, serta menjadi agen perubahan yang menyebarkan nilai-nilai moderasi beragama.²⁹

Dalam konteks ini, penelitian ini memiliki keunikan dan kontribusi tersendiri. Dengan fokus pada implementasi teknologi dalam pembelajaran PAI di Lombok Timur, penelitian ini memberikan wawasan baru tentang bagaimana pendidikan agama dapat beradaptasi dengan dinamika masyarakat yang terus berubah. Diharapkan, hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi bagi kebijakan pendidikan yang lebih luas, serta memberikan inspirasi bagi sekolah-sekolah lain dalam mengembangkan model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokal.

DAFTAR REFERENSI

- Abdullah, M. Amin. 2020. "Pendidikan Islam dan Toleransi Sosial." *Jurnal Pendidikan Islam* 14, no. 1: 45-50.
- Azra, Azyumardi. 2020. *Moderasi Beragama dalam Pendidikan*. Jakarta: Prenada Media.
- Dhofier, Zamakhsari. 2019. *Islam dan Pendidikan: Pendekatan Inklusif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Fauzi, I., dan Hakim, L. 2021. "Implementasi Nilai Moderasi Beragama di Sekolah: Studi Kasus." *Jurnal Pendidikan dan Perubahan Sosial* 9, no. 2.
- Hasan, M. 2022. "Integrasi Nilai Moderasi Beragama dalam Kurikulum PAI: Sebuah Evaluasi." *Jurnal Studi Islam dan Pendidikan* 15, no. 1.

²⁷Ismail, "Pengaruh Politik Global terhadap Pendidikan Agama," *Jurnal Pendidikan Islam* 15, no. 2 (2021): 115-130.

²⁸M. Amin Abdullah, "Pendidikan Islam dan Toleransi Sosial," *Jurnal Pendidikan Islam* 14, no. 1 (2020): 45-50.

²⁹Azyumardi Azra, *Moderasi Beragama dalam Pendidikan* (Jakarta: Prenada Media, 2020), 89-91.

-
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2020. *Pedoman Kebijakan Moderasi Beragama*. Jakarta: Kemenag.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2023. *Laporan Evaluasi Pelatihan Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2019. *Pedoman Implementasi Pendidikan Karakter*. Jakarta: Kemdikbud.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2021. *Pedoman Implementasi Pendidikan Moderasi Beragama*. Jakarta: Kemdikbud.
- Mustofa, A. 2022. "Revitalisasi Model Pembelajaran PAI dalam Merespons Era Digital." *Jurnal Tarbiyah Islamiyyah* 10, no. 2.
- Prasetyo, B. 2022. *Literasi Digital dalam Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahman, F. 2020. "Efektivitas Kurikulum Berbasis Wasathiyah dalam Meningkatkan Sikap Inklusif Peserta Didik." *Jurnal Pendidikan Islam Progresif* 8, no. 3.
- Rahman, F., dan Azizah, N. 2022. "Disinformasi Keagamaan dan Polarisasi Sosial di Media Sosial." *Jurnal Komunikasi dan Agama* 14, no. 2.
- Rahman, F., dan Fitriani, S. 2024. *Pendidikan Islam di Era Digital: Tantangan dan Peluang*. Jakarta: Prenada Media.
- Sari, D., dan Hidayat, M. 2023. "Implementasi Kurikulum Moderasi Beragama di Sekolah Menengah." *Jurnal Pendidikan Islam* 11, no. 1.
- Sari, D., dan Nugroho, A. 2023. "Media Sosial dan Ruang Gema dalam Konteks Keberagaman Agama." *Jurnal Sositologi* 22, no. 1.
- Suryanto, E., dan Nugroho, A. 2024. "Literasi Digital dan Moderasi Beragama di Era Media Sosial." *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* 12, no. 1.
- Suryanto, R., dan Nugroho, A. 2024. "Peran Strategis Pendidikan Agama dalam Penguatan Moderasi Beragama." *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* 26, no. 1.
- Zamakhsari Dhofier. 2019. *Islam dan Pendidikan: Pendekatan Inklusif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Creswell, John W. 2018. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. 4th ed. Thousand Oaks: Sage Publications.
-